

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP MAKANAN DALAM KEMASAN YANG TELAH
KADALUWARSA DIKOTA PEKANBARU
(Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau**



OLEH :

SEVILA APRIOLEM
NIM: 10727000161

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2013**

ABSTRAK

Penjualan produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa tergolong banyak di daerah kota Pekanbaru, bahkan tidak hanya terbatas pada toko-toko atau supermarket. Atas kegiatan penjualan produk makanan kemasan tersebut, konsumen pun menjadi sering tidak terlindungi. Bahkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 perlindungan terhadap konsumen itu masih tetap tidak dilaksanakan oleh pedagang khususnya pedagang produk makanan dalam kemasan.

Permasalahan pokok penelitian ini yaitu pertama Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa di kota Pekanbaru, kedua Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dan upaya penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa, serta ketiga apakah penanganannya sudah terlaksana dengan baik oleh pihak-pihak penegak hukum terhadap pelaku usaha yang nakal.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang yuridis empiris yakni dengan cara meneliti langsung lapangan, sedangkan dalam menetapkan sampel menggunakan teknik *random sampling* yang mana respondennya ditetapkan secara acak, sementara pengambilan data dilakukan dengan cara menelitian langsung kemudian menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait serta dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa yang dijual pedagang di kota Pekanbaru adalah dilakukan pedagang dengan memberikan penggantirugian dan agar pelaksanaan perlindungan konsumen itu dapat terlaksana dengan baik dilakukan pengawasan oleh pemerintah.

Mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pedagang makanan dalam kemasan dalam usaha melindungi konsumen di kota Pekanbaru adalah harus memenuhi kewajiban administratif dan melakukan penggantirugian jika konsumen merasa dirugikan lalu sebagai upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pedagang dalam hal terjadinya sengketa yang berhubungan dengan produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluarsa yang diperjualbelikan di kota Pekanbaru tidaklah pernah dilakukan di peradilan umum atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), akan tetapi dilakukan dengan cara damai.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan RahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa (Studi Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota)”** sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sebagaimana terlihat di daerah kota Pekanbaru penjualan produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa tergolong cukup banyak dilakukan oleh pedagang, bahkan bila diperhatikan secara seksama maka diantara makanan kemasan tersebut masihlah banyak tidak memenuhi persyaratan.sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Fenomena ini tentunya memerlukan suatu analisa agar dapat ditemukan cara yang baik dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen khususnya.

Pada dasarnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan kepada pembaca yang budiman sudilah kiranya memberikan saran-sarannya agar tercipta suatu karya ilmiah yang lebih baik. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ayahanda Suhardi dan Bunda Rosmiyanti yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a, dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkahi hidup ayahanda dan ibunda di dunia dan akhirat. Juga kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. HM. Nazir, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSQA Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta Jajarannya, Pembantu Dekan I Ibu Dra. Hertina, Ph.D, Pembantu Dekan II bapak H.M. Kastulani, SH. MH dan Pembantu Dekan III Bapak Drs. H. Ahmad Darbi, MA yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Hajar, MA. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
5. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH. MH. dan Sekretaris Jurusan Bapak H. Maghfirah, MA, serta Staf Jurusan Ilmu Hukum Bapak M. Ilham. SH.
6. Bapak Firdaus, SH. MH, Bapak Beni Asrianto, SH. MH, Ibu Lysa Anggraini SH. MH, serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau yang tidak

dapat disebutkan satu Persatu yang telah Membimbing dan memberikan Ilmu yang bermanfaat Kepada Penulis.

7. Sahabat-sahabatku Alpi, Aidil, Dede, Hendra (Kheyek), Prima,Iyal, Adek, serta teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (Bisnis) yang telah memberikan motivasi dan pikiran dalam kuliahku, terima kasih atas bantuannya selama ini.
8. Buat yang tersayang Aulia Rahmi SE. yang telah memberikan support serta bantuannya selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih
9. Buat teman-teman alumni SLTP N 14 Angkatan 2002/2003 dan teman-teman Alumni SMA Setia Dharma Angkatan 2005/2006 yang selalu memberikan dukungan. Terima kasih

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan ribuan terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya yang berlimpah kepada kita. Amin.

Pekanbaru, 17 Desember 2012

Penulis

SEVILA APRIOLEM
NIM. 10727000161

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstraksi	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Teoritis	9
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM	16
A. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen.....	16
B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	18
C. Pengertian Kadaluwarsa	21
D. Tinjauan Teoritis tentang Konsepsi Perlindungan Konsumen	22
BAB III GAMBARAN UMUM	27
A. Sejarah Kota Pekanbaru	27
B. Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru	28
C. Kondisi Perekonomian Kota Pekanbaru.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa di Kota Pekanbaru	34
B. Tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal tidak dipenuhinya hak-hak konsumen	44
C. Penanganan Kasus-kasus yang terjadi dilapangan terhadap Makanan dalam Kemasan yang telah Kadaluwarsa kepada Pelaku Usaha yang Nakal	50
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru.....	30
Tabel III.1. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru di lihat dari Mata Pencarian	31
Tabel IV.1. Cara-cara Pelaku Usaha melaksanakan Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa	36
Tabel IV.2. Cara-cara Konsumen Melaksanakan Perlindungan Diri atas Produk Makanan Dalam Kemasan.....	39
Tabel IV.3. Pelaku Usaha Yang Usaha Penjualan Produk Makanan Kemasannya Selalu Diawasi Oleh Pihak Pemerintah.....	42
Tabel IV.4. Konsumen Yang Ikut Berpartisipasi MelakukanPengawasan Terhadap Perlindungan Konsumen Yang Dilaksanakan Oleh Pedagang	43
Tabel IV.5. Pelaku Usaha Yang Pernah Melakukan Penggantirugian Terhadap Konsumen Yang Merasa Dirugikan.....	47
Tabel IV.6. Konsumen Yang Pernah Mendapatkan Penggantian Rugi dari Pelaku Usaha Akibat Mengaiami Kerugian.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja.¹ Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan.²

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen.

Beban konsumen bertambah berat di masa krisis ekonomi ini, dengan harga-harga yang tinggi, walaupun kualitasnya masih dipertanyakan, adanya

¹ Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 103

² Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 1

penipuan ukuran, berat kg, penggantian tanggal kadaluwarsa, pemalsuan, serta beredarnya produk-produk luar negeri ilegal di pasaran.

Dalam upaya penyelesaian kasus-kasus konsumen tersebut, sering kali YLKI berhadapan dengan tidak adanya peraturan atau tidak diawasinya pelaksanaan suatu peraturan sehingga pengusaha dapat bersikap masa bodoh.

Ini dilakukan para produsen karena persaingan yang begitu hebat dan masyarakat menginginkan harga murah terhadap produk pangan tersebut. Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di Negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.³

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dibidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan

³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 6

kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.⁴

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluarsa atau *expired*, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluarsa atau *expired*. Adapun, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluarsa atau *expired* itu terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti :⁵

- a. Kalengnya sudah mengembung.
- b. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur.
- c. Rasanya tidak seperti yang di promosikan di kaleng.
- d. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika di buka.
- e. Terus bisa jadi kemasan produknya bukan kemasan terbaru tapi masih dengan kemasan model yang lama.
- f. Kemasan produk tidak berdebu itu bukanlah suatu jaminan bahwa produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Perlindungan konsumen di Indonesia berdasar pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap dapat

⁴ Yusuf sofie, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumennya* dalam John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007, h. 69.

⁵ <http://mediaindo.co.id/mediaanda/default.asp?page=371>. 07 Juli 2011

memperjuangkan hak-hak konsumen. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut adalah :⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang disebutkan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada. Hak tersebut dapat dikaitkan pula dengan hak atas kenyamanan,

⁶ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang atau jasa khususnya terhadap produk pangan kemasan yang kadaluwarsa. Informasi yang merupakan salah satu hak konsumen didalamnya terkait beberapa hal diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, isi kandungan yang terdapat dalam produk, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan cara mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan produsen baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya.⁷ Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen. Kasus-kasus konsumen yang tidak mendapatkan perhatian dari pengusaha dan pemerintah pada perkembangan berikutnya semakin menghilangkan kepercayaan pengusaha pada masalah konsumen.

Melihat persoalan-persoalan yang ada dalam perlindungan konsumen serta aturan yang mengatur yakni Undang-Undang perlindungan konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap pelanggaran-pelanggaran atas hak konsumen namun, hal ini belum dapat

⁷ James F. Engel et al., *Consumer Behavior* dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 41.

teralisasi dengan baik. Ketidakpekaan ini kemudian menjurus pada semakin jauhnya para pengusaha dari norma-norma etika, semakin menipisnya etika bisnis dikalangan pelaku usaha mengakibatkan semakin sulitnya para konsumen untuk mendapatkan hak-haknya. Jika dilihat dari fakta-fakta yang ada, kerugian selalu ada dipihak konsumen maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni :⁸

- a. Perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak luas. Dalam kasus semacam itu, kerugian yang diderita konsumen bersifat massal.
- b. Dampak yang ditimbulkan pelaku usaha juga dapat bersifat seketika tetapi ada pula yang terlihat dan terasa setelah beberapa waktu.
- c. Kalangan yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah.
- d. Pada umumnya mereka tidak mempunyai pilihan lain karena hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi syarat.

Peredaran makanan kadaluwarsa ini juga dapat ditemui peredarannya di pasar-pasar modern seperti supermarket atau swalayan serta warung-warung kios makanan, seperti yang ditemukan kasus peredaran makanan kemasan yang kadaluwarsa ini beredar diwarung kios Barokah (nama disamarkan), yang didapati oleh seorang pembeli bernama siti (nama disamarkan) yang menemukan beberapa makanan kemasan yani chiki taro yang telah kadaluwarsa. Pedagang kios tersebut berkilah, mengaku tidak mengetahui jika ada barang-barang yang tak layak jual. Pedagang tersebut hanya meminta maaf kepada pembeli dan bersedia mengganti makanan chiki tersebut dengan yang baru.

⁸ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Penerbit Panta Rei 2005. h. 11

Dengan, demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan Judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DALAM KEMASAN YANG TELAH KADALUWARSA (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa ?
- b. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa ?
- c. Bagaimana kasus-kasus yang terjadi dilapangan terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa, apakah penanganannya sudah terlaksana dengan baik oleh pihak-pihak penegak hukum terhadap pelaku usaha yang nakal ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian jika tidak terpenuhinya hak-hak konsumen oleh para pelaku usaha dan sebagai masukan bagi semua pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Untuk mengetahui apakah penanganan kasus makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa sudah terlaksana dengan baik oleh pihak-pihak penegak hukum terhadap pelaku usaha yang nakal.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

- a. Untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana.
- b. Sebagai bahan evaluasi oleh pihak toko swalayan yang ada di Pekanbaru terhadap perlindungan konsumen.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU dan bahan rujukan bagi mahasiswa/i lain yang hendak meneliti lebih lanjut lagi tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa.

D. Tinjauan Teoritis

Keadaan yang universal pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak berada pada kedudukan yang aman, maka dari itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang universal pula. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji.⁹

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹¹

Sejalan dengan maksud dan tujuan perlindungan konsumen yang dilakukan negara-negara maju dan berkembang di dunia ini. Seperti halnya di Indonesia kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia walaupun undang-undang ini bukanlah aturan yang

⁹ Abdul Halim Barakatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, h. 19.

¹⁰ N.H.T. Siahaan, *op.cit.*, h. 32.

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

pertama dan terakhir karena sebelumnya ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa aturan perundang-undangan yang ada. Namun, tetap saja memiliki tujuan yang tercapai. Tujuan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah:¹²

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan konsumen.

Apapun tujuannya baik secara umum maupun khusus kehadiran undang-undang perlindungan konsumen dianggap menjadi benteng bagi konsumen yang selama ini lemah kedudukannya serta diharapkan juga dengan kehadiran undang-undang ini dapat membantu meluruskan persepsi yang keliru dari pelaku usaha bahwa perlindungan konsumen dan perangkatnya sebagai upaya menghambat perkembangan dunia usaha. Pihak yang berperan dalam keberhasilan untuk mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi adalah pemerintah, produsen, dan konsumen. Pemerintah dengan seluruh kewenangan yang dimilikinya dapat membuat aturan dan memaksa semua pihak untuk

¹² Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, h. 21.

menaati aturan tersebut, dalam prakteknya hal ini belum terealisasi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Keamanan suatu produk pada saat produksi, kualitasnya dapat menurun karena perjalanan dan waktu, sehingga untuk produk tertentu khususnya makanan ditentukan masa kadaluwarsa. Mengenai masa kadaluwarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksud agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsi. Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya tanggal kadaluwarsanya tetapi tanggal-tanggal lain.

Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu:

- a. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang produk tersebut;
- b. Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya (*stock rotation*);
- c. Produsen dirangsang untuk menggiatkan pelaksanaan “*quality control*” terhadap produknya.

Pengertian kadaluwarsa dalam peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan karena berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346 / Men.Kes/Per/IX/1983, Pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985, Pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan sudut pandang yuridis empiris, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara meneliti langsung lapangan.

2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian antara lain: DISPERINDAG Kota Pekanbaru, Balai POM Kota Pekanbaru, Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Kota Pekanbaru, pelaku usaha swalayan, serta konsumen (masyarakat bawah).

Objek penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi konsumen.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian.¹³ Adapun populasi yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yaitu pihak DISPERINDAG Kota Pekanbaru, Balai POM Kota Pekanbaru, Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Kota Pekanbaru, pelaku usaha yang berada diwilayah kelurahan Sukaramai kecamatan Pekanbaru Kota sebanyak 113 pedagang makanan dalam kemasan, serta masyarakat kelurahan Sukaramai kecamatan Pekanbaru Kota sebanyak 1657 orang pada tahun 2012.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, h. 98

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁴ Bila populasi besar, dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu populasi harus betul-betul representatif (mewakili).¹⁵

Dalam menetapkan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil. Maka diambil sampel sebesar 5% dari jumlah populasi, yakni sebanyak 90 orang yang terdiri dari 40 pelaku usaha makanan dalam kemasan yang berada diwilayah kelurahan Sukaramai kecamatan Pekanbaru Kota, serta 50 orang masyarakat (konsumen).

4. Sumber data

Sumber data penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara serta menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap produk pangan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa.
- b. Sumber data skunder ialah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

¹⁴ Ibid, h. 119

¹⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 91

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam memberikan jawaban permasalahan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat dan mengamati langsung objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah perlindungan konsumen, yakni : DISPERINDAG Kota Pekanbaru, Balai POM Kota Pekanbaru, dan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Kota Pekanbaru,.

c. Angket (*Questioner*)

Dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada responden seperti: pelaku usaha makanan dalam kemasan, serta masyarakat (konsumen) yang berada diwilayah kelurahan Sukaramai kecamatan Pekanbaru Kota, yang sifatnya mengarahkan dan mengingatkan kepada masyarakat atau responden tentang objek kajian penelitian.

d. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara memperdalam berbagai literatur yang terkait dengan perlindungan konsumen seperti peraturan perundang-undangan, dan teori-teori sebagai tambahan dalam penulisan skripsi.

6. *Analisa Data*

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka serta penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yakni dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian disusun serta dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barakatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Konsumen Atas Kelalaian Produsen*, Departemen Kehakiman RI, 1992
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Gunawan Wijaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- <http://mediaindo.co.id/mediaanda/default.asp?page=371>. 07 Juli 2011
- James F. Engel et al., Consumer Behavior dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Penerbit Panta Rei 2005
- Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007
- Sugiono, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*
- Yusuf sofie, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumennya* dalam John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

BAB II

TINJAUAN UMUM PELAKU USAHA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen

Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁶

Seperti yang terdapat didalam Pasal 1 butir 2 UUPK, didalam pasal tersebut tidak ada menyebutkan kata pembeli, yang dipergunakan adalah pemakai, pengertian pemakai didalam definisi tersebut menunjukkan pengguna barang dan/atau jasa sebagai hasil dari transaksi.

Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya berdasarkan hubungan transaksi jual beli saja, melainkan lebih dari pada hal tersebut dapat disebut sebagai konsumen. Karena seseorang tersebut tidak hanya sekedar sebagai pembeli, walaupun tidak sebagai pembeli dengan pihak pelaku usaha dari kontrak tersebut, seseorang tersebut sebagai konsumen dapat melakukan klaim atas kerugian yang diderita dari pemakaian produk tersebut, maka jelaslah bahwa konsumen tidak sebatas pada transaksi

¹⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

jual beli saja, akan tetapi setiap orang (perorangan, badan atau kegiatan usaha) yang mengkonsumsi ataupun memakai suatu produk.

Bagi konsumen antara barang dan/atau jasa itu adalah berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Sedangkan distributor atau pedagang merupakan penjual yang menjual produk setengah jadi atau produk jadi yang dijadikan sebagai dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa tersebut di pasar industri ataupun pasar produsen.¹⁷

Sedangkan bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat.¹⁸

Unsur untuk membuat barang dan jasa lain ataupun untuk diperdagangkan kembali merupakan pembeda pokok, antara konsumen-antara (menjual kembali) dan konsumen-akhir, yaitu terdapat pada penggunaannya bagi konsumen akhir adalah untuk dirinya sendiri, keluarga atau rumah tangganya. Unsur inilah, yang pada dasarnya merupakan beda kepentingan dari masing- masing konsumen. Penggunaan sesuatu produk untuk keperluan atau tujuan tertentu merupakan tolak ukur dalam menentukan perlindungan yang

¹⁷ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2002), h. 14.

¹⁸ *Ibid.*

diperlukan.¹⁹

Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk tersebut dibuat, bagaimana proses pembuatannya, serta strategi apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka hukumlah yang dibutuhkan untuk melindungi posisi dari konsumen tersebut. Perlindungan tersebut sesungguhnya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan dari konsumen dan pelaku usaha, karena antara pelaku usaha dan konsumen itu saling berhubungan dan saling membutuhkan, maka dari itu seharusnya tidaklah saling merugikan satu sama lain

B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Majunya tingkat ilmu dan teknologi dalam memproduksi produk-produk konsumen, membuat konsumen makin awam menyangkut produk kebutuhannya sendiri. Tentunya hal ini disatu sisi dapat menimbulkan kekecewaan konsumen yang menghadapkan konsumen pada resiko kerugian materi maupun bahaya atas keselamatan tubuh dan keamanan jiwanya, termasuk keluarganya yang paling disayangi.

Secara umum perjuangan di Indonesia terhadap perlindungan konsumen ini telah dimulai pada tahun 1970-an, yang diikuti dengan lahirnya Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bulan Mei 1973 yang sekarang ini bernama Lembaga Perlindungan Konsumen atau disingkat LPK. Akan tetapi perjuangan tersebut baru bisa terwujud dan dituangkan dalam suatu bentuk

¹⁹ *Ibid*, h. 15

perundangan-undangan pada tanggal 20 April 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah merupakan undang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional yang sekaligus memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan berlandaskan pada falsafah negara bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini jika ditinjau dari segi pemberlakuannya dapatlah dikatakan tidaklah bermaksud untuk mematikan usaha para pelaku usaha, akan tetapi tidak lebih sebagai upaya pemberdayaan iklim berusaha yang sehat serta mendorong lahirnya usaha-usaha yang tangguh dengan produk-produk konsumen yang berkualitas.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diundangkan, terdiri dari XV bab dengan 65 pasal. Dan bila dikelompokkan norma-norma perlindungan konsumennya, terbagi dalam:

- a. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
- b. Ketentuan pencantuman klausula baku

Secara umum dari pengelompokan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan proses produksi dan jasa sampai ke tangan konsumen baik melalui transaksi atau peralihan lainnya yang dibenarkan hukum belumlah menggambarkan mata rantai hubungan yang baik antara pelaku usaha dengan konsumen. Sehubungan itulah melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur kewajiban pelaku usaha, yaitu:²⁰

²⁰ Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sementara perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain memproduksi atau memperdagangkan barang yang:²¹

- 1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
- 2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- 3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keisitimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- 7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- 8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
- 9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat

²¹ Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
11. Barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
12. Sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Selain hak dan kewajiban pelaku usaha seperti di atas, hak dan kewajiban konsumen pun juga diatur oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dapat dilihat pada Pasal 4 dan 5, demikian pula dengan perihal tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang kemudian harus dilakukan pengawasan.

Dari sejumlah perumusan norma-norma yang bersifat formal ini, Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mencantumkan norma-norma hukum pidana. Pencantuman norma pidana ini tentunya jika di lihat secara arif, adalah sebagai proses kriminalisasi yang dilakukan secara emosional yang mengarah pada sifat yang hanya karena tidak berdayanya instrumen hukum administrasi negara dan instrumen hukum perdata atas sejumlah perilaku usaha.

C. Pengertian Kadaluwarsa

Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, dan apabila dikonsumsi makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang

mengkonsumsinya.²²

Penjualan barang ataupun peredaran produk makanan kemasan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen apabila dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan. Dengan adanya peredaran produk kadaluwarsa di tengah-tengah masyarakat selaku konsumen dari produk-produk yang sudah kadaluwarsa tersebut, maka pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada. fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Sikap adil dan tidak memihak sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha diharapkan mampu melindungi konsumen, akan tetapi perlindungan konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan dari konsumen itu sendiri yang juga dapat merugikan kepentingan dari produsen ataupun pelaku usaha, jadi haruslah terciptanya keseimbangan antara kepentingan dari konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha.

D. Tinjauan Teoritis tentang Konsepsi Perlindungan Konsumen

Berbicara mengenai perlindungan konsumen, maka kita tidak akan terlepas dari kepentingan konsumen itu sendiri. Salah satu kepentingan

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007)

konsumen di maksud adalah mengenai keamanan dan kelayakan barang dan jasa yang diwujudkan dalam bentuk standarisasi oleh undang-undang kesehatan.

Pada dasarnya sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen diundangkan dan dinyatakan berlaku mengikat pengaturan tentang kepentingan-kepentingan konsumen, dapat dikatakan telah diatur terlebih dahulu oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Salah satu bukti bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ini sebagai sumber hukum perlindungan konsumen yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen ialah dengan dirumuskannya mengenai standarisasi makanan dan minuman sebagaimana terdapat pada Pasal 21 dengan bunyi sebagai berikut:²³

1. Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar atau persyaratan kesehatan.
2. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Bahan yang dipakai
 - b. Komposisi setiap bahan
 - c. Tanggal, bulan dan tahun kedaluarsa
 - d. Ketentuan lainnya
3. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan mengenai makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan di atas memberikan suatu simpulan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan setiap produk

²³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 *tentang Kesehatan*

makanan maupun minuman yang diproduksi oleh pelaku usaha haruslah selalu memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Adapun tata cara pemenuhan syarat-syarat kesehatan dimaksud oleh undang-undang kesehatan antara lain dengan mencantumkan tanda label pada kemasan, agar masyarakat dapat mengetahui informasi yang benar tentang isi, kehalalan dan asal bahan (bahan pokok, bahan tambahan dan bahan penolong) yang dipakai. Perbuatan mengedarkan makanan tanpa label ini, dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan maksimum satu tahun dan atau denda maksimum Rp. 15.000.000,- (Pasal 84 jo. Pasal 85).

Sebagai upaya pemerintah dimana agar ketentuan undang-undang tersebut dapat dijalankan maka berdasar Pasal 73, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaran upaya kesehatan itu, dengan maksud bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat:²⁴

1. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan atau bahaya terhadap kesehatan.
4. Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan.

Penjualan produk makanan kemasan tersebut selain umumnya dilakukan di warung-warung kecil, kios, juga ada yang dilakukan di toko-toko besar penjual makanan dan minuman (seperti pada supermarket dan mini market). Penjualannya dirancang sedemikian rupa mulai dari menampilkan

²⁴ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 *tentang Kesehatan*

desain yang menarik sampai pada penjualan dengan harga obral dengan cara *cash and carry*.

Ironisnya walaupun produk makanan kemasan ini tidak menyediakan informasi sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan, tetap saja diminati oleh konsumen.

Dengan demikian, dalam kata lain bahwa produk makanan kemasan ini telah nyata-nyata tidak mencantumkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun. Sebaliknya pemerintah yang oleh undang-undang ditugaskan sebagai badan pengawas, serta pemberi informasi terhadap konsumen tetap saja seakan-akan menutup mata atas kenyataan ini. Bahkan kalau dapat dikatakan tindakan pemerintah sekarang seolah-olah melegalkan keberadaan produk makanan kemasan yang sedemikian rupa itu, untuk diperjualbelikan bebas dipasaran.

Padahal bila mau jujur, tingkat pengetahuan konsumen kita terhadap produk-produk makanan kemasan yang diperjualbelikan di pasar itu hampir rata-rata sangat minim sekali. Dalam artian tidaklah semua konsumen kita yang memiliki pendidikan memadai untuk memahami maksud dan tujuan produk itu dibuat.

Sebagai akibat dari penjualan produk makanan kemasan tersebut, konsumen pun tidak jarang menjadi pihak yang dirugikan. Kerugian dimaksud bisa dalam bentuk kerugian atas informasi atau kerugian dalam hal pengajuan klaim jika merasa dirugikan. Singkatnya penjualan produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa di daerah kota Pekanbaru masih banyak dilakukan tanpa pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha.

Kalau ada jenis pertanggung jawaban yang ditawarkan oleh pelaku usaha, itu pun sering kali tidak memberikan kepuasan kepada konsumen. Memang di dalam prakteknya, penjual ada yang mencoba menanggapi keluhan konsumen makanan kemasan yang telah kadaluwarsa, tetapi paling hanyalah sebatas pengungkapan keprihatinannya. Dalam lain pengertian kebanyakan penjual masih tetap saja merasa bahwa pertanggungjawaban atas produk yang dijualnya bukanlah berada padanya, akan tetapi pada pihak dimana penjual telah melakukan pembelian, demikian seterusnya.

Tingginya minat penjual untuk memperdagangkan makanan kemasan ini antara lain selain karena adanya kompensasi yang akan diperoleh oleh penjual dari hasil penjualannya juga karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk makanan kemasan, yang secara tidak langsung telah meningkatkan penjualan.
2. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa.
3. Tingginya minat beli masyarakat atau konsumtifnya masyarakat terhadap makanan kemasan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir sebelum masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi Sungai Siak (di seberang pelabuhan yang ada sekarang).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah (wafat 1791), dusun ini berkembang dan pusatnya berpindah keseberang (ke selatan) sekitar pasar bawah yang kemudian bernama SENAPELAN.

Selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluhm Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi PEKANBARU. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemesintahan Sultan Mohamad Ali Muazan Syah (1684-1801).

Pada waktu penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlanche Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan controluer (PHB) Pemerintah Belanda.

Sewaktu penduduk Jepang, Pekanbaru menjadi GUN yang dipakai oleh GUN CHO dan tempat kedudukan Riau SYUTJOUKANG. Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi :²⁵

²⁵ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2000*, h.15

1. Hemente Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 Tanggal 1 Mei Tahun 1946
2. Kota kecil berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1956
3. Kotapraja berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1957
4. Kotamadya berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1974

B. Geografis dan Demografis kota Pekanbaru

Kota pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada dikota Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai ibu kota Provinsi Riau. Dengan demikian, kota Pekanbaru adalah sebagai salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi pemerintahan Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang terletak di Ibukota Provinsi Riau dengan posisi Geografis 101°14-101°-34 Bujur Timur dan 0°25-0°45 Lintang Utara dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak

Sedangkan Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat maka kota Pekanbaru dibagi menjadi dua belas (12) Kecamatan yang dipimpin oleh

Camat, adapun kecamatan-kecamatan yang ada dikota Pekanbaru antara lain sebagai berikut :

1. Kecamatan Tampan
2. Kecamatan Bukit Raya
3. Kecamatan Marpoyan Damai
4. Kecamatan Senapelan
5. Kecamatan Suka Jadi
6. Kecamatan Lima Puluh
7. Kecamatan Rumbai
8. Kecamatan Tenayan Raya
9. Kecamatan Sail
10. Kecamatan Pekanbaru Kota
11. Kecamatan Rumbai Pesisir
12. Kecamatan Payung Sekaki

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi kota salah satu tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib dikota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap dikota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan Sarana dan Prasarana, baik disektor kesehatan, sektor pendidikan , tempat ibadah dan lain sebagainya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin.

Terjaminnya kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru secara tidak langsung berpengaruh terhadap keadaan Kota Pekanbaru dimana tingkat terjadinya kejahatan dapat dikurangi, tercipta ketertiban lingkungan di masyarakat serta terciptanya rasa tentram dalam bathin masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam tabel :

Tabel III.1
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2011

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	426.032 Jiwa
2.	Perempuan	423.968 Jiwa
Jumlah		850.000 Jiwa

Sumber data Kantor Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah penduduk kota pekanbaru dari dua belas (12) kecamatan berjumlah 850.000 jiwa (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu).

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan hal ini dapat dilihat dari perkembangan kota Pekanbaru yang disertai dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahun semakin bertambah dan hal yang harus diperhatikan adalah dengan pesatnya pertumbuhan terhadap penduduk maka maka hal yang harus seimbang adalah dengan itu yaitu tempat atau ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada dikota Pekanbaru.

C. Kondisi Perekonomian Kota Pekanbaru

Perdagangan memiliki peranan penting terhadap sektor perekonomian Kota Pekanbaru. Dalam empat tahun terakhir, kondisi perdagangan mengalami perkembangan cukup baik. Pertumbuhan pada tahun 2011 cukup tinggi mencapai 10,11 persen.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko-ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant.

Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.²⁶

Sungai Siak sebagai jalur lintas perdagangan juga dapat membawa dampak negatif terhadap dengan banyaknya produk-produk ilegal yang masuk ke Kota Pekanbaru. Berhubung Kota Pekanbaru berada di wilayah yang dilewati

²⁶ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Tahun 2011

kapal-kapal asing yang membawa barang-barang ilegal, baik itu makanan dalam kemasan ataupun barang-barang elektronik, karena masih banyak produk-produk yang tidak memiliki surat keterangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru semakin gencar melakukan pengawasan guna melindungi konsumen, terlebih terhadap produk makanan dalam kemasan yang akan memasuki masa limit penggunaan ataupun yang telah kadaluwarsa.²⁷

²⁷ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Tahun 2011

BAB IV

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

TERHADAP MAKANAN DALAM KEMASAN YANG TELAH

KADALUWARSA (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Secara umum perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang di kemas wajiblah di beri tanda atau label yang berisi:

- a. Bahan yang dipakai;
- b. Komposisi setiap bahan;
- c. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
- d. Ketentuan lainnya.

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan.²⁸

Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Karena dengan informasi tersebutlah konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan kemasan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk dimaksud. Kepala BPOM Bapak I. Putu lebih jauh menegaskan mengenai informasi ini harus dilaksanakan oleh pengusaha sebelum produk tersebut diedarkan atau dipasarkan kepada konsumen.²⁹

Dan untuk menjamin kepastian bahwa produsen ataupun pedagang akan melaksanakan pemberian informasi ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 31 ayat (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pemerintah mengancam

²⁸ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 39

²⁹ Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Balai Penelitian Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Oktober 2012

pelakunya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perlindungan konsumen dilaksanakan pedagang yang menjual produk makanan kemasan di daerah kota Pekanbaru, dapat di lihat tabel berikut ini.

Tabel IV. 1
Cara-cara Pelaku Usaha Melaksanakan Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Menyediakan layanan konsumen	0	0
2.	Memberikan penggantirugian	13	32,5
3.	Tidak ada	27	67,5
	Jumlah	40	100

Sumber: Data Olahan, Oktober 2012

Dari uraian tabel di atas terlihat bahwa pelaku usaha yang menyatakan melaksanakan perlindungan konsumen atas produk makanan dalam kemasan dengan cara menyediakan layanan konsumen tidak ada sama-sekali, sedangkan yang menyatakan melaksanakannya dengan cara memberikan penggantirugian terdapat sebanyak 13 pelaku usaha atau sebesar sebesar 32,5%, sedangkan yang menyatakan tidak ada melaksanakan dengan cara apapun terdapat sebanyak 27 pelaku atau sebesar 67,5% dari jumlah keseluruhan responder.

Rendahnya jumlah pedagang produk makanan dalam kemasan yang melaksanakan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana data di atas,

secara umum dapatlah dikemukakan bahwa kenyataan tersebut disebabkan hal-hal berikut:

1. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan sanksi-sanksi yang diancamkan jika dirinya tidak melaksanakannya.
2. Lemahnya sistim pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat terhadap perlindungan konsumen sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.
3. Kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 58 huruf h UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.³⁰

Sebagai akibat langsung dari indikator-indikator di atas maka tentunya di satu pihak konsumen mau tidak mau harus menerima dirinya sebagai korban produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa yang diperdagangkan pedagang sekaligus korban dari tidak konsekwennya pemerintah atas peraturan yang telah diundangkannya.

Kenyataan tersebut tentunya tidaklah baik bagi konsumen apalagi jika di tinjau dari hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang antara lain menyebutkan:³¹

³⁰ Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1996 merumuskan “Barang siapa memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan atau Benda paling banyak Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta).

³¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

- a. Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- b. Berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Berhak atas hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dapat diketahui pelaksanaan perlindungan konsumen ini tidaklah semata-mata dari pelaku usaha. Sebab di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa semua unsur memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakannya, baik itu pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat maupun konsumen itu sendiri.

Sebagai upaya LPK Kota Pekanbaru dalam melindungi konsumen, menurut Ketua LPK Kota Pekanbaru Bapak Drs. Rizal Pudael yakni selalu diupayakan dengan berbagai macam cara. Khusus terhadap produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang pernah dilakukan adalah melakukan razia-razia bersama dengan pihak terkait. Terhadap temuan produk yang tidak layak konsumsi atau yang diproduksi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia, kepada konsumen diberikan himbauan agar produk dimaksud tidak dikonsumsi.³²

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Ibu El Sabrina M.P, melakukannya dengan cara mendata produk-produk dan perusahaan-perusahaan yang memasukkannya.³³

³² Hasil wawancara Penulis dengan Ketua LPK Kota Pekanbaru, Oktober 2012

³³ Hasil wawancara Penulis dengan Kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru, Oktober 2012

Sementara Kepala BPOM Pekanbaru yakni Bapak I. Putu menjelaskan, selain mengharuskan pengusaha mencantumkan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk makanan kemasan, perlindungan konsumen juga dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap produk-produk kemasan yang sedang diperjualbelikan di pasar. Dan apabila dari hasil penelitian laboratorium BPOM terhadap produk kemasan dimaksud tidak baik bagi kesehatan sebagaimana dimaksud UU No 23 Tahun 1992 maka dilakukan himbauan kepada konsumen melalui media massa agar tidak mengkonsumsinya.³⁴

Untuk mengetahui bagaimanakah cara-cara konsumen melaksanakan perlindungan konsumen atas produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa yang diperjualbelikan oleh pedagang, dapat di lihat uraian tabel berikut.

Tabel IV.2
Cara-cara Konsumen Melaksanakan Perlindungan Diri atas Produk Makanan Dalam Kemasan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Membaca informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa produk kemasan	20	40
2.	Tidak ada	30	60
	Jumlah	50	100

Sumber : Data Olahan, Oktober 2012

Dari uraian tabel IV.2 di atas terlihat bahwa yang menyatakan konsumen melaksanakan perlindungan konsumen atau untuk dirinya sendiri

³⁴ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Balai POM Pekanbaru, Oktober 2012

dengan cara membaca informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa produk kemasan terdapat sebanyak 20 orang atau sebesar 40%, sementara yang menyatakan tidak ada melakukan dengan cara apapun terdapat sebanyak 30 orang atau sebesar 60% dari jumlah responden.

Dari uraian-uraian di atas dapat dijelaskan bahwa usaha-usaha untuk melindungi konsumen dari dampak negatif produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa di daerah kota Pekanbaru telah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Tidak hanya itu, pengusaha dan konsumen juga turut melaksanakannya, sekalipun masih terdapat berbagai kekurangan-kekurangan.

Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah merupakan aturan hukum yang mengatur dan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun demikian agar terlaksananya segala upaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka perlulah dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada kesinambungan perlindungan konsumen itu.

Menurut Ketua LPK Kota Pekanbaru Bapak Drs. Rizal Pudael, salah satu upaya yang dilakukan agar perlindungan konsumen yang telah dilaksanakan itu dapat berjalan dengan baik adalah dengan melakukan pengawasan secara terencana, rutin, dan berkala terhadap produk kemasan yang diperjualbelikan di toko-toko atau supermarket. Karena di tempat-tempat

seperti ini sangat berpotensi beredarnya produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa tetapi masih tetap diperjualbelikan.³⁵

Adanya produk-produk kemasan yang sudah kadaluwarsa merupakan indikasi bahwa sistem peraturan yang ada belum cukup baik untuk mengcover kepentingan konsumen. Dan tentunya sebagai pihak yang berkompeten melakukan pengawasan dalam hal ini adalah instansi kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh BPOM.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen adalah dengan menerapkan ketentuan administratif bagi pedagang yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan-tindakan administratif itu, berupa, pemberian peringatan secara tertulis kepada pedagang yang bersangkutan, melarang mengedarkan, mencabut izin usaha dan lain sebagainya.³⁶

Tindakan administratif yang dilakukan oleh BPOM ini, hendaklah dilakukan bersifat positif. Artinya, setiap perilaku hendaklah diberi imbalan sesuai dengan perilaku itu sendiri, tanpa menimbulkan kerugian pada konsumen.³⁷

Untuk mengetahui bahwa kegiatan perlindungan konsumen dari pedagang mendapat pengawasan dari Pihak pemerintah dapat di lihat uraian tabel berikut ini:

³⁵ Hasil wawancara penulis dengan Ketua LPK Kota Pekanbaru, Oktober 2012

³⁶ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Balai POM Pekanbaru, Oktober 2012

³⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, h. 138

Tabel IV.3
Pelaku Usaha yang Usaha Penjualan Produk Makanan Kemasannya
selalu diawasi oleh Pihak Pemerintah

No	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Ya	25	62,5
2.	Tidak	15	37,5
	Jumlah	40	100

Sumber : Data Olahan, Oktober 2012

Dari uraian tabel IV.3 di atas terlihat bahwa pelaku Usaha yang menyatakan selalu mendapat pengawasan dari pihak pemerintah terdapat sebanyak, 25 orang atau sebesar 62,5% sedangkan yang menyatakan tidak mendapat pengawasan dari pihak pemerintah sebanyak 15 orang atau sebesar 37,5% dari jumlah responder.

Banyaknya pedagang yang menyatakan mendapat pengawasan dari pihak pemerintah menandakan bahwa perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh pedagang belumlah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Atau dalam arti lain pedagang melaksanakan perlindungan konsumen bisa jadi karena selalu merasa diawasi.

Seperti diketahui melindungi konsumen dari berbagai dampak negatif pengkonsumsian barang atau makanan kemasan yang telah kadaluwarsa pada khususnya adalah merupakan salah satu tujuan diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992. Akan tetapi sebagaimana diuraikan di atas, tanpa adanya pengawasan

yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, perlindungan konsumen itu selalu menjadi bagian yang sulit untuk dilaksanakan.

Menurut Ketua LPK Kota Pekanbaru Bapak Drs. Rizal Pudael mengatakan salah satu cara agar pelaksanaan perlindungan konsumen itu tetap terjaga dan terlaksana perlu adanya partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi perlindungan konsumen yang diberikan oleh pedagang, misalnya dengan jalan mengkritisi setiap tindakan pedagang yang nyata-nyata merugikan konsumen.³⁸

Untuk mengetahui apakah konsumen ikut melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan pedagang, berikut dapat, di lihat uraian tabel dibawah ini.

Tabel IV.4
Konsumen yang ikut berpartisipasi melakukan Pengawasan Terhadap
Perlindungan Konsumen yang dilaksanakan oleh Pedagang

No	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Ya	19	38
2.	Tidak	31	62
	Jumlah	50	100

Sumber : Data Olahan, Oktober 2012

Dari uraian tabel IV.4 di atas terlihat bahwa konsumen yang ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen yang dilaksanakan pedagang terdapat sebanyak sebanyak 19 orang atau sebesar 38% sedangkan yang menyatakan tidak ikut berpartisipasi melakukan pengawasan

³⁸ Hasil wawancara penulis dengan Ketua LPK Kota Pekanbaru, Oktober 2012

terhadap perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh pedagang sebanyak 31 orang atau sebesar 62% dari jumlah responder keseluruhan.

Dari kenyataan-kenyataan di atas maka dapat dikemukakan bahwa di daerah kota Pekanbaru masih banyak konsumen kita yang masih belum dapat memberikan partisipasinya dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh pedagang produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa. Oleh karena itu agar pengawasan terhadap perlindungan konsumen ini perlulah pemerintah memberikan bukti kepada konsumen, melalui tindakan-tindakan publiknya.³⁹

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Penyelesaian Hukumnya Jika Terjadi Perselisihan Antara Konsumen dan Pelaku Usaha dalam hal tidak dipenuhinya Hak-hak Konsumen

Di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dirumuskan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³⁹ Az. Nasution, Op. Cit. hal. 133

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan menurut Kepala Balai POM Bapak I. Putu mengatakan, kewajiban pedagang atau setiap orang yang bergerak di bidang produk makanan kemasan, haruslah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi, dimana prosedurnya diajukan kepada Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Tentunya dengan adanya rekomendasi terhadap makanan kemasan ini maka dapatlah dipastikan bahwa pedagang secara administratif telah melaksanakan kewajibannya.⁴⁰

Kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pedagang produk makanan kemasan tersebut, tentulah ada hubungannya dengan perlindungan

⁴⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ketua BPOM Kota Pekanbaru, Oktober 2012

konsumen, antara lain terjaminnya alamat bagi konsumen untuk mengajukan gugatan atau klaim kerugian.

Oleh karena itu sebuah produk makanan kemasan yang di perjualbelikan wajib di daftarkan oleh pedagang, agar dapat diketahui oleh umum bahwa produk tersebut telah terdaftar di Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Pedagang juga wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa produk tersebut pada kemasan.⁴¹

Menurut penulis, banyaknya konsumen yang ragu-ragu tentang masalah kewajiban administratif pedagang ini adalah akibat terbatasnya pengetahuan konsumen tentang kewajiban administratif pedagang makanan kemasan. Sebab selama ini kebanyakan konsumen hanya mengetahui apa yang menjadi kewajiban pedagang secara umum, seperti melayani konsumen dengan jujur, beritikad baik atau memberikan penggantian rugi jika konsumen mengalami kerugian.

Sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan konsumen produk makanan kemasan adalah jika konsumen mengalami kerugian. Padahal berdasar ketentuan hukum yang berlaku, secara tegas menyatakan pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap akibat atau kerugian konsumen yang ditimbulkan oleh produk yang diperdagangkannya. Akan tetapi dengan tidak terdapatnya alamat si pedagang makanan kemasan tersebut, kemana konsumen mengajukan klaim. Apalagi kerugian konsumen ini disebabkan oleh karena sudah lewat masa penggunaannya.

⁴¹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Oktober 2012

Maka oleh sebab itulah pelaku usaha khususnya pengecer makanan kemasan harus bertanggung jawab apabila produk yang dijualnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dan itu secara tugas diatur oleh Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴²

Salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 itu adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen baik dalam bentuk produk yang sama harganya atau dalam bentuk kompensasi lainnya yang disepakati antara penjual dan pembeli, seperti memberikan biaya perawatan bagi konsumen yang terganggu kesehatannya.

Untuk mengetahui pelaku usaha penjual produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang pernah melakukan penggantian terhadap konsumen, dapat dilihat melalui uraian tabel berikut.

Tabel IV.5
Pelaku Usaha Yang Pernah Melakukan Penggantian Terhadap
Konsumen Yang Merasa Dirugikan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Pernah	13	32,5
2.	Tidak Pernah	27	67,5
	Jumlah	40	100

Sumber Data Olahan, Oktober 2012

Dari tabel IV.5 di atas terlihat bahwa pelaku usaha yang pernah melakukan penggantian terhadap konsumen yang merasa dirugikan terdapat sebanyak 13 orang atau sebesar 32,5% sedangkan pelaku usaha yang

⁴² Hasil wawancara penulis dengan Ketua LPK Kota Pekanbaru, Oktober 2012

tidak pernah melakukan penggantian terhadap konsumen yang merasa dirugikan sebanyak 27 orang atau sebesar 67,5% dari jumlah responder.

Terdapatnya sebagian pelaku usaha yang melaksanakan kewajibannya itu yaitu dengan bertanggung jawabnya pelaku usaha terhadap kerugian konsumen maka dapat disebutkan penggantian ini biasanya hanya dilakukan oleh penjual eceran saja yang mungkin ada rasa takut kehilangan pelanggan. Sementara bagi pelaku usaha pada tingkat produsen dapat dikatakan hampir tidak pernah dilakukan apalagi jika dihubungkan dengan sikap pelaku usaha yang tidak mencantumkan identitasnya dalam kemasan sebagaimana terurai di atas.

Di sisi lainnya juga tak dapat dipungkiri bahwa kerugian konsumen itu adalah juga disebabkan rendahnya pengetahuan konsumen, adanya kebiasaan mengkonsumsi produk makanan kemasan tanpa informasi yang jelas dan kurang sadarnya konsumen akan hak-haknya. Namun demikian bukan berarti kerugian dan kelemahan konsumen itu menjadikan pelaku usaha terbebas dari kewajibannya untuk bertanggung jawab. Sebab, sesungguhnya apabila kehidupan seseorang terganggu oleh pihak lain maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta atau tidak untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang layak, apalagi penghidupan bagi kemanusiaan, merupakan hak dari warga negara dan hak semua orang.⁴³

Sebagaimana biasanya akibat pengkonsumsian produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa ini adalah sangat beragam, ada berupa

⁴³ Az.Nasution, Op, Cit, h. 32

kerugian produk dan ada pula kerugian gangguan kesehatan. Terhadap kerugian itu sesuai dengan prinsip yang dianut oleh undang-undang perlindungan konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian konsumen. Dan pelaku usaha hanya dapat terbebas dari penggantian kerugian itu jika pelaku usaha mampu membuktikan bahwa kerugian itu memang merupakan dari kesalahan konsumen.

Untuk mengetahui jumlah konsumen yang pernah mendapat pengganti rugi dari pelaku usaha makanan kemasan akibat produk tidak layak konsumsi karena sudah kadaluwarsa, dapat dilihat uraian tabel berikut.

Tabel IV.6
Konsumen yang Pernah Mendapatkan Penggantian Rugi dari Pelaku Usaha Akibat Mengalami Kerugian

No	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Pernah	11	22
2.	Tidak Pernah	39	78
	Jumlah	50	100

Sumber : Data Olahan, Oktober 2012

Dari uraian tabel IV.6 di atas terlihat bahwa dari 50 orang responden sebanyak 11 orang atau sebesar 22% menyatakan pernah mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha akibat mengalami kerugian sedangkan sebanyak 39 orang atau sebesar 78% menyatakan tidak pernah mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha walaupun mengalami kerugian.

Dari kenyataan di atas, dimana sebagian besar konsumen tidak pernah mendapatkan hak-haknya berupa penggantian kerugian, menurut hemat penulis

adalah disebabkan oleh beberapa hal, yang antara lain berawal dari konsumen yang selalu menganggap bahwa kerugiannya itu tidaklah seberapa atau konsumen pernah meminta penggantian rugi dan oleh pelaku usaha tetapi tidak ditanggapi dengan baik.

C. Penanganan Kasus-kasus yang terjadi dilapangan terhadap Makanan dalam Kemasan yang telah Kadaluwarsa kepada Pelaku Usaha yang Nakal

Terhadap uraian-uraian sub bahasan terdahulu dapat ditarik suatu simpulan sementara, bahwa gangguan terhadap kepentingan konsumen itu dapat berupa:

- a. Terjadinya gangguan atas fisik, jiwa, atau harta benda konsumen.
- b. Tidak diperolehnya keuntungan maximal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi konsumen.

Dan kenyataan ini tentunya sangat bertentangan dengan hak-hak konsumen sebagaimana yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Berdasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketaanya melalui:⁴⁴

⁴⁴ Rumusan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

- a. Peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Pengadilan Negeri.
- b. Penyelesaian sengketa di luar peradilan.

Sebagaimana halnya Pengadilan Negeri adalah merupakan tempat di mana orang mencari keadilan demikian pula dengan BPSK. Oleh karena itu setiap orang yang bersengketa akan mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri atau BPSK untuk mendapatkan hak-haknya, terlebih-lebih konsumen makanan kemasan kadaluwarsa yang dirugikan jika menghendaknya.

Akan tetapi sayang, konsumen yang menggunakan Lembaga Peradilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini tidaklah ada sama sekali. Langkanya konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Peradilan Negeri ini tidak terlepas dari permasalahan biaya yang dibutuhkan dalam beracara, sementara pokok perkara yang akan diperkarakan jauh lebih kecil nilainya dari biaya beracara di Pengadilan.

Ketua BPSK Kota Pekanbaru Bapak Asrial SH. juga menyatakan bahwa walaupun banyak terjadi kerugian konsumen sebagai akibat dari pengkonsumsian makanan kemasan yang telah kadaluwarsa di daerah kota Pekanbaru, dalam riilnya tidaklah pernah diselesaikan melalui Lembaga Peradilan Umum. Adapun alasannya sengketa konsumen ini tidak diarahkan kepada Pengadilan Negeri adalah karena besarnya biaya yang diperlukan untuk beracara di Pengadilan Negeri, sementara konsumen makanan kemasan yang telah kadaluwarsa dapat dikatakan semuanya berasal dari golongan yang lemah terutama dari segi finansial. BPSK sebagai badan yang diharapkan sebagai

badan penyelesaian sengketa konsumen dengan biaya murah, secara teknis sampai sekarang belumlah jelas pemberdayaannya di kota Pekanbaru.⁴⁵

Tidak adanya pelaku usaha yang menyelesaikan sengketanya dengan konsumen di Pengadilan Negeri atau BPSK, secara umum dapat dikemukakan adalah sebagai konsekwensi dari sikap konsumen yang selalu menghindari konflik.

Sebab pada diri konsumen kita masih ada prinsip bahwa lebih baik mengalami kerugian, dari pada harus mengeluarkan biaya yang begitu besar hanya untuk mencari keadilan yang dalam kenyataannya belum tentu sepenuhnya memenuhi rasa keadilan.

Lahirnya prinsip sedemikian rupa pada konsumen, maka sesuai dari jawaban pelaku usaha di atas yaitu tidak satupun yang membawa sengketanya diselesaikan di hadapan Peradilan Umum, begitu pula dengan konsumen dalam prakteknya. Kenyataan ini biasanya terjadi bukanlah karena adanya tekanan dari pihak pelaku usaha atau dari pihak-pihak tertentu. Akan tetapi karena konsumen sadar bahwa beracara di Pengadilan atau BPSK itu tergolong rumit dan memerlukan waktu yang relatif lama.

Memang tak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan negeri pastilah selalu memerlukan waktu yang relatif lama. Dan hal ini tentunya sangat tidak efektif bagi perkara konsumen yang rata-rata yang hanya berkenaan dengan penggantian produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa.

⁴⁵ Hasil wawancara Penulis dengan Ketua BPSK Kota Pekanbaru, Oktober 2012

Tidak adanya pelaku usaha dan konsumen yang menyelesaikan sengketanya dengan konsumen melalui Lembaga Peradilan Umum dan BPSK, bukan berarti permasalahan-permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak pernah diselesaikan. Dalam prakteknya mereka tetap menyelesaikannya, akan tetapi tanpa melalui Pengadilan atau BPSK.

Menurut Ketua LPK Pekanbaru Bapak Drs. Rizal Pudael menegaskan, konsumen dan pelaku usaha dapat saja membuat upaya penyelesaian sengketa apabila para pihak tidak mau menyelesaikan sengketanya di Lembaga Peradilan Umum atau BPSK, asal tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar Peradilan Umum dan BPSK itu ialah seperti melakukannya dengan cara damai atau dengan cara-cara yang patut. Sehubungan cara yang di tempuh oleh para pihak ini adalah diluar Lembaga Peradilan Umum atau BPSK, maka sebagai konsekwensinya apapun yang menjadi keputusan yang diputuskan oleh para pihak, kedua belah pihak harus sepakat untuk melaksanakannya.⁴⁶

Jika diperhatikan penyelesaian damai sebagaimana dimaksud Ketua LPK Pekanbaru tersebut, tidaklah jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana di rumuskan dalam penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

“penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak

⁴⁶ Hasil wawancara penulis dengan ketua LPK Pekanbaru, Oktober 2012

yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang akan bersengketa”.

Yang dimaksud dengan penyelesaian damai ialah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui Pengadilan atau BPSK dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Fenomena ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak selamanya Lembaga Peradilan Umum dan BPSK sebagai satu-satunya lembaga yang mampu memberikan penyelesaian sengketa dengan adil, akan tetapi penyelesaian dengan cara damai juga jauh lebih baik. Dan ini sudah terbukti sebagaimana yang dilakukan oleh para pelaku usaha penjual makanan kemasan yang telah kadaluwarsa.

Dapat diketahui dalam proses penyelesaian sengketa konsumen berarti ada hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha yang mana akibat dilanggarnya hak-hak konsumen tersebut, pelaku usaha menjadi berkewajiban untuk menggantinya. Dan dalam prinsipnya jika konsumen meminta pengganti rugi maka sama artinya konsumen menginginkan hak-haknya itu dapat kembali seperti sedia kala.

Akan tetapi dimana tidak ada satu orang pun konsumen yang menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Umum maupun BPSK, tentulah permintaan penggantian rugi itu menjadi dilematis.

Sebab konsumen tidak pernah menggugat pelaku usaha melalui Lembaga Peradilan Umum atau BPSK, dan satu-satunya cara hanyalah dengan cara-cara damai. Sebagaimana yang biasa telah dilakukan, konsumen cukup

hanya mendatangi pelaku usaha penjual makanan kemasan yang telah kadaluwarsa dimana membelinya lalu mengajukan klaim. Mana kala klaim konsumen di terima pelaku usaha maka para pihak pun selanjutnya menyepakati bentuk-bentuk penggantirugian.⁴⁷

Akan tetapi untuk diketahui adapun hal-hal yang disepakati dalam penyelesaian cara-cara damai ini biasanya, masalah sebatas masalah penggantirugian produk yang umumnya berkenaan dengan produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa, kemasan produk yang sobek atau rusak. Sementara yang berhubungan dengan masalah penggantirugian dalam hal melakukan perawatan dimana konsumen mengalami sakit karena mengkonsumsi produk hampir tidak pernah dilakukan.

Jadi pada intinya baik pelaku usaha atau penjual makanan kemasan maupun konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang dibelinya, selalu mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai tanpa melibatkan pihak-pihak lain atau lembaga-lembaga peradilan.

⁴⁷ Hasil wawancara penulis dengan Ketua LPK Pekanbaru, Oktober 2012

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap pokok permasalahan maka dapatlah disimpulkan beberapa hal berikut :

- a. Pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang dijual pedagang di daerah kota Pekanbaru pada intinya dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan konsumen adalah dengan berbagai upaya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dan agar pelaksanaan perlindungan konsumen dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melakukan pengawasan-pengawasan.
- b. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pedagang makanan kemasan dalam usaha melindungi konsumen dikota Pekanbaru adalah memenuhi kewajiban administratif, antara lain terdaftarnya produk dan perusahaan makanan kemasan di BPOM. Disamping kewajiban administratif tersebut kewajiban yang harus dipenuhi pedagang adalah memberikan ganti kerugian sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pedagang dalam hal makanan kemasan yang telah kadaluwarsa di kota Pekanbaru adalah tidak ada yang dilakukan di

peradilan umum atau pada BPSK. Akan tetapi sebagaimana yang berlaku dalam prakteknya, pelaku usaha dan konsumen hanya menempuh dengan cara-cara damai. Dan sesuai dengan penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa dengan cara-cara ini adalah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

- c. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah terhadap pelaku usaha memberikan ruang gerak kepada pelaku usaha untuk bersikap tidak sportif dalam memperdagangkan makanan terutama makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa. Adapun dampak yang ditimbulkan dari usaha perdagangan makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa dapat berakibat fatal terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa tersebut.

B. Saran

Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Kepada pelaku usaha, khususnya pedagang supaya selalu setiap saat melindungi konsumen, dari berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang diperjualbelikannya. Disamping itu juga supaya dapat menjual yang telah memenuhi syarat-syarat administratif.

- b. Kepada BPOM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat memberikan bukti nyata kepada konsumen tentang hasil tindakan publiknya. Karena dengan demikian akan tercipta suatu dampak yang mengarah pada perlindungan konsumen yang baik.
- c. Kepada pihak-pihak penegak hukum hendaklah lebih ditingkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha supaya konsumen dalam membeli makanan kemasan dapat terlindungi dari para pelaku usaha yang masih memperjualkan makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa. Karena masih jarangunya pedagang yang mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun, serta nama perusahaan yang memproduksi makanan kemasan tersebut, maka bila terjadi kerugian tentulah konsumen yang selalu dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barakatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, DayaWidya, Jakarta, 1999
- _____ *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- _____ *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
- <http://mediaindo.co.id/mediaanda/default.asp?page=371>. 07 Juli 2011
- James F. Engel et al., Consumer Behavior dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Penerbit Panta Rei, 2005
- Sugiono, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Yusuf sofie, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumennya* dalam John
Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan
Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007

Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009